

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR : 500.12.10 / 186.a / KSM**

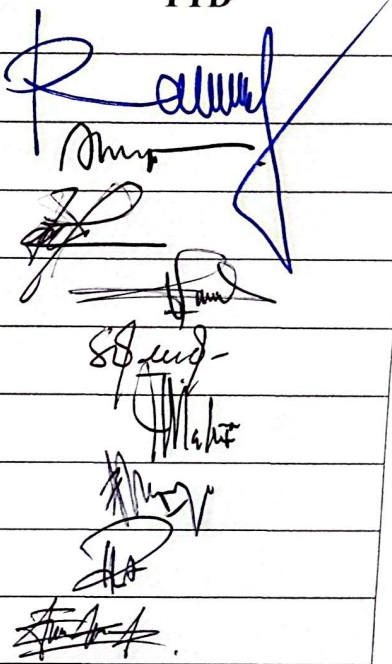
Pada hari Senin, tanggal 13 bulan Oktober Tahun 2025 bertempat di Ruang Aula Kantor Camat Sukamaju, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| <b>Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)</b> | <b>Dasar Hukum Pengecualian Informasi</b>                                                                                                                                                              | <b>Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)</b>             |                                                                          | <b>Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                        | <b>Dibuka</b>                                                                                              | <b>Ditutup</b>                                                           |                                                         |
| Biodata Elektronik ASN (DATABASE)                                          | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H                                                                                                                                                      | Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia                                                              | Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia                        | Tidak Terbatas                                          |
| Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin        | 1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h<br>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h                                                                                                 | Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia                                                          | Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia                        | Tidak Terbatas                                          |
| Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan                   | 1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h<br>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                                                | Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia                                                          | Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia                        | Tidak Terbatas                                          |
| Daftar nilai DP3/SKP PNS                                                   | 1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h<br>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h<br>3. PP No. 11 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai                             | Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia                                                          | Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia                        | Tidak Terbatas                                          |
| Data Rekam medis PNS                                                       | 1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j<br>2. UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47<br>3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/IIII/2008 Pasal 12 dan 13 | Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatandan fisik seseorang                                    | Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang | Tidak Terbatas                                          |
| Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural                      | 1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H<br>2. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                                                  | Mengganggu,menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas,keamanan dan kapasitas hukum                        | Terbatas sampai dengan pelantikan                       |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                  |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 3. PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No.100 Tahun 2000                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                  |                                                                      |
| Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia                      | 1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i<br>2. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan                                                                                                                                                                                                     | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur                            | Melindungi kerahasiaan dokumen                                                   | Tidak Terbatas                                                       |
| Daftar username dan Password website SKPD                        | UU No.11 Tahun 2011 tentang IT                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mencegah perubahan data                                                                                     | Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers | Selama password/kode berlaku                                         |
| Laporan Pertanggungjawaban Keuangan                              | UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                 | Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan | Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang                 | Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan |
| Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan                  | Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang                                                                                                                                                                                                                                                    | Menimbulkan penilaian yang obyektif                                                                         | Penetapan nilai pengadaan yang akurat                                            | Selama proses pengadaan barang dan jasa                              |
| Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa              | Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa                                                                                                                                                                                                                                           | Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat                                                                   | Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian                               | Selama proses pengadaan barang dan jasa                              |
| Laporan penggunaan dana kegiatan swakelola/tender                | Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa                                                                                                                                                                                                                                          | Mengganggu proses tahapan pelaksanaan proyek/kegiatan                                                       | Dapat memperlancar proses audit internal                                         | Selama proyek kegiatan belum diaudit APIP/ persentase eksternal      |
| Kode akses/pasword aplikasi elektronik : SIMRAL/e-Planing, e-RFK | UU No.11 Tahun 2011 tentang IT                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mencegah perubahan data                                                                                     | Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers | Selama password/kode berlaku                                         |
| Surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan                         | UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                 | Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan | Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang                 | Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan |
| Kode akses elektronik                                            | UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE (Pasal 30)                                                                                                                                                                                                                        | Penyalah gunaan oleh pihak lain                                                                             | Menjaga keamanan jaringan komputer                                               | Tidak Terbatas                                                       |
| Laporan Keuangan yang belum Diaudit                              | 1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah<br>2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature                                 | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan                              | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit          |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan SAP                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Kegiatan rahasia trantib dan penanganan kasus yang mengganggu masyarakat seperti organisasi masyarakat yang tidak sesuai peraturan perundang Undangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 26</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</li> </ol> | Dapat terdeteksi dini oleh pihak-pihak yang mengganggu masyarakat dan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan | Menjaga ketertiban dan pertahanan keamanan                 | Tidak Terbatas                                    |
| Dokumen Penyelesaian Sengketa/ Konflik Tanah                                                                                                          | UU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan                                                                                                                                                                                                                  | Dapat menghambat proses penegakan hukum                                                                          | Membantu kelancaran proses penegakan hukum                 | Sampai dengan Penyelesaian Sengketa/Konflik Tanah |
| Data Obyek pajak dan retribusi                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah</li> <li>3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah</li> </ol>                 | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak                                               | Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi | Tidak Terbatas                                    |
| Data penerima bantuan program Pemerintah.                                                                                                             | Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai                                                                                                                                                                                                                 | Berisi data penerima yang akan diverifikasi                                                                      | Dokumen terjaga kerahasiaannya                             | Tidak Terbatas                                    |
| LPJ Realisasi Dana Desa                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa</li> <li>2. Peraturan Desa No. 1 Tahun 2023 tentang LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022</li> </ol>                                                                     | Menjaga proses penyelesaian/kebijakan                                                                            | Melindungi kerahasiaan dokumen                             | Tidak Terbatas                                    |
| Laporan kegiatan pembangunan di Kelurahan/Desa yang bermasalah                                                                                        | UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Permasalahan dan Pengawasannya                                                                                                                                                                                                                             | Menjaga proses penyelesaian/kebijakan                                                                            | Melindungi kerahasiaan dokumen                             | Tidak Terbatas                                    |
| Sengketa tanah (GRG,Alas Hak)                                                                                                                         | UU RI No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya                                                                                                                                                                                             | Menjaga proses penyelesaian/kebijakan                                                                            | Melindungi kerahasiaan dokumen                             | Tidak Terbatas                                    |
| Sengketa rumah tangga(Perceraian)                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li> <li>2. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI)</li> </ol>                                                                                                                         | Menjaga proses penyelesaian/kebijakan                                                                            | Melindungi kerahasiaan dokumen                             | Tidak Terbatas                                    |

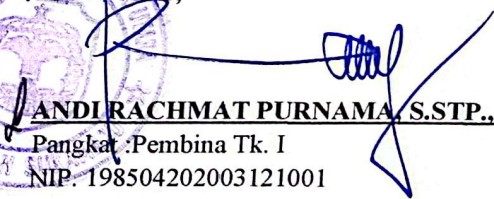
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

| No | Nama                              | Jabatan                                           | Unit Kerja                | TTD                                                                                 |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Andi Rachmat Purnama, S.STP., M.M | Camat Sukamaju (Atasan PPID Pembantu)             | Kantor Kecamatan Sukamaju |  |
| 2  | Mersi, SE                         | Sekretaris Camat (PPID Pembantu)                  | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |
| 3  | Ita, SE                           | Kasi Pertanahan dan Pemerintahan Umum             | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |
| 4  | Irwanto, S.AN                     | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |
| 5  | Saderiah, SH                      | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum              | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |
| 6  | Mahyuni, A.Md                     | Kasi Kependudukan dan Pelayanan Umum              | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |
| 7  | Endang Ratna C, SP                | Kasi Kesejahteraan dan Kebersihan                 | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |
| 8  | Sri Rahmawati, SE                 | Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan            | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |
| 9  | Muhammad Firdaus, S.AN            | Kasubag Program dan Pelaporan                     | Kantor Kecamatan Sukamaju |                                                                                     |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Sukamaju, 13 Oktober 2025

**CAMAT,**

**ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP., M.M**

Pangkat :Pembina Tk. I

NIP. 198504202003121001